



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL



Triwulan III
2020

Penanggung Jawab : ADE ROHMAN
Ketua Tim : Nur Amalia | Editor : Widarto S. | Desain Grafis : Royana Dewi
Anggota : Muayad | Catur Rini | Tri Winarti | Siti Fatimah

**KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN**

Provinsi Banten



DAFTAR ISI

I.	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL	1
A.	Produk Domestik Bruto	1
B.	Inflasi	1
C.	Indikator Kesejahteraan	2
D.	Penyesuaian Pembangunan Ekonomi Banten	4
II.	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN	5
A.	Pendapatan Negara	6
B.	Belanja Negara	9
C.	Prognosis Realisasi APBN	11
III.	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD	12
A.	Pendapatan Daerah	13
B.	Belanja Daerah	16
C.	Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020	17
IV.	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)	18
A.	Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasi	18
B.	Pendapatan Konsolidasian	18
C.	Belanja Konsolidasian	20
D.	Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	22
V.	BERITA / ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH	24
A.	Program Kartu Prakerja, akselerator Inklusi Keuangan dan Pemulihan Ekonomi di Banten	24
B.	Kontribusi Subsidi Bunga kepada UMKM di Banten dalam rangka PEN	25

I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

A. Produk Domestik Regional Bruto

Jika pertumbuhan ekonomi Banten triwulan II-2020 terkontraksi 7,40 persen, maka pada triwulan III-2020 ini pertumbuhannya sudah membaik meskipun masih minus, yaitu 5,77 persen.

Sektor Industri Pengolahan yang selama lima tahun terakhir dominan berkontribusi di atas 30 persen terhadap kinerja ekonomi Banten mengalami kontraksi 6,57 persen. Sektor yang paling terdampak yaitu transportasi dan perdagangan terkontraksi 35,82 persen. Di sisi lain, pandemi Covid-19 merubah cara hidup masyarakat lebih memanfaatkan kemudahan

Gambar I.1 Persentase Kontribusi Lapangan Usaha Dominan terhadap PDRB (ADHB)



Sumber : BPS Banten

teknologi sehingga sektor Informasi dan Komunikasi tumbuh 11,9 persen. Tekanan perekonomian selama triwulan II-2020 dan triwulan III-2020 berakibat menurunnya daya beli masyarakat. Permintaan domestik seperti konsumsi rumah tangga belum menunjukkan perbaikan. Kontraksi agregat konsumsi rumah tangga dan komponen total net ekspor turut mempersulit upaya perbaikan ekonomi di Banten. Data BPS, nilai PDRB atas harga berlaku (ADHB) pada Triwulan III-2020 mencapai Rp155,08 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan Rp109,49 triliun. Nilai PDRB Banten dari tahun 2015 sampai dengan 2019 berada di delapan besar provinsi dengan angka PDRB terbesar dari 34 provinsi. Kontribusi wilayah Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi Banten didominasi oleh wilayah Tangerang Raya yang mencapai 60 persen¹.

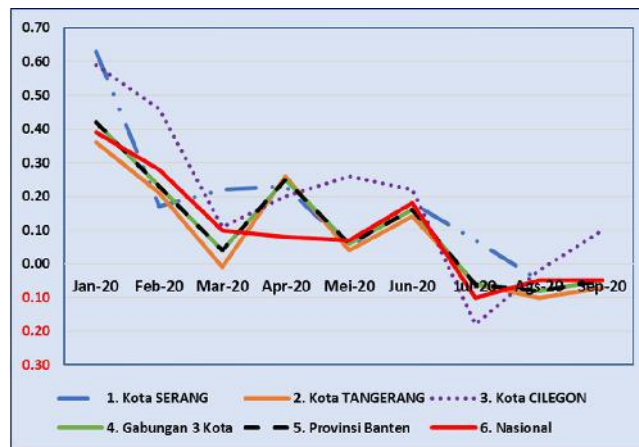
B. Inflasi

Inflasi (m-t-m) Banten bulan September 2020 menandai deflasi untuk ketiga kalinya selama tiga bulan berturut-turut. BPS mencatat deflasi September 2020 mengalami sedikit kenaikan sebesar 3 bps menjadi 0,05 persen (m-t-m) sama persis dengan deflasi nasional. Kontributor deflasi dominan bulan September 2020 adalah kelompok barang

¹ Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2020

rekreasi, olah raga, dan budaya berupa sepeda, sepeda anak, dan angkutan udara sebesar 0,77 persen, serta kelompok barang bergejolak seperti bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai merah, jeruk, melon, dan susu bubuk sebesar 0,38 persen. Tiga kota yang disurvei BPS yaitu Kota Serang, Kota Cilegon, dan

Gambar I.2 Inflasi Bulanan 2020



Sumber : BPS Banten

Kota Tangerang tercatat dua kota yang mengalami deflasi dan hanya kota Cilegon yang mengalami inflasi sebesar 0,10 persen.

C. Indikator Kesejahteraan

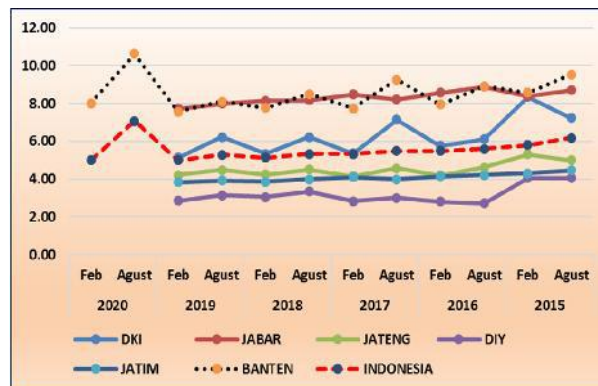
1. Pengangguran

BPS mencatat TPT Banten pada Agustus 2020 naik menjadi 10,64 persen, lebih tinggi dari dua tahun terakhir, yaitu 8,11 persen pada Agustus 2019 dan 8,52 persen pada Agustus 2018.

penambahan jumlah penduduk usia kerja di Banten Agustus 2020 sebesar 2,7 persen (y-o-y) sehingga jumlahnya menjadi 9.630.893 orang. Populasi angkatan kerja (usia 15 sampai 64 tahun) naik 2,65 persen (y-o-y) menjadi 6,21 juta orang.

Meskipun pengangguran naik tajam, namun TPAK Agustus 2020 kurang signifikan mengalami perubahan (turun 0,04 persen (y-o-y)). Penurunan TPAK mengindikasikan menurunnya

Gambar I.3 TPT Pulau Jawa dan Nasional (persen)



Sumber : BPS Nasional dan Banten

kecenderungan ekonomi aktif untuk mencari atau melakukan kegiatan ekonomi. Pemerintah Banten memproyeksikan TPT untuk tahun 2020 sebesar 9,15 persen.² Provinsi Banten memiliki angka pengangguran tertinggi di Indonesia selama tiga tahun berturut-turut sejak 2018 bahkan angkanya selalu di atas nasional. Menurut Kadisnakertrans Provinsi Banten sampai dengan September 2020 terdapat 72 perusahaan yang tutup. Pandemi Covid-19 turut melemahkan kondisi ekonomi dan aktivitas bisnis. Akibatnya produksi menurun sehingga permintaan tenaga kerja ikut turun sehingga masyarakat semakin susah menemukan pekerjaan baru. Deflasi selama triwulan III-2020 juga turut menyumbang angka pengangguran. Dampak deflasi kepada pemilik usaha atau penyedia barang/jasa adalah *trade off* antara pengurangan biaya produksi atau PHK. Dan bagi pelaku bisnis akan memilih opsi PHK karena lebih rasional ketimbang pengurangan biaya produksi.

2. Indeks Pembangunan Manusia

Merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia yang menunjukkan akses penduduk terhadap hasil pembangunan

antara lain pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya di suatu wilayah. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu 1). umur panjang dan hidup sehat (Angka

Tabel I.1 Capaian dan Target Dimensi IPM Banten

INDIKATOR	CAPAIAN			TARGET
	2017	2018	2019	2020
AHH	69,49	69,64	69,84	70,66
HLS	12,78	12,85	12,88	14,00
Rata2 Lama Sekolah	8,53	8,62	8,74	8,9
Pengeluaran Per Kapita	11.659	11.994	12.267	12.610

Sumber : BPS dan KUAPBD TA 2020

Harapan Hidup saat lahir (AHH)), 2). pengetahuan (Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Sekolah), dan 3). standar hidup layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan. Hampir seluruh target indikator IPM 2019 tidak tercapai, target AHH sebesar 70,06 tahun, HLS 13,5 tahun, dan pengeluaran per kapita sebesar Rp12.307,00. Hanya target rata-rata lama sekolah yang realisasinya terlampaui yaitu 8,7 tahun. Meskipun target AHH tidak tercapai tetapi AHH di Banten selama lima tahun terakhir mengalami tren peningkatan. Target AHH tahun 2020 sebesar 70,66 tahun berarti bayi yang dilahirkan pada tahun 2020 memiliki peluang hidup sampai dengan usia 70,66 tahun. Namun demikian target dimaksud

² KUP-APBD TA 2020

masih di bawah UHH nasional yang pada tahun 2018 dan 2019 mencapai angka 71,20 tahun dan 71,34 tahun. Begitu juga capaian HLS lima tahun terakhir selalu di bawah angka nasional. Sedangkan penduduk Banten usia lima belas tahun keatas menempuh pendidikan formal selama lima tahun terakhir fluktuatif terhadap capaian nasional.

D. Penyesuaian Pembangunan Ekonomi Banten

Berdasarkan evaluasi capaian indikator makro ekonomi selama ini, maka Pemerintah Provinsi Banten dan DPRD melakukan Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2020. Perubahan target capaian indikator makro ekonomi tahun 2020 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel I.2 Perubahan Target Indikator Makro Ekonomi Banten 2020

INDIKATOR EKONOMI	TARGET		REALISASI
	MURNI	PERUBAHAN	
LPE (persen)	6.2	0,1 - 0,5	-5,77 (y-o-y Triwulan III-2020)
TPT (persen)	8	9.15	10,64 (Agustus 2020)
Penduduk miskin (persen)	4.87	5.75	5,03 (Maret 2020)
IPM (persen)	72.2	72.8	72,44 (2019)
Gini Ratio	0.37	0,360 - 0,365	0,363 (Maret 2020)

Sumber : BPS dan KUP-APBD 2020

II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Realisasi pendapatan negara di Banten pada triwulan III-2020 sebesar Rp30.440,31 miliar atau 60,96 persen dari target, menurun sebesar 0,89 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Penurunan terjadi di seluruh jenis penerimaan perpajakan dalam negeri seiring perekonomian Banten yang berkontraksi 5,77 persen (yoy).

Pada sisi belanja negara, Realisasi APBN triwulan III-2020 di Banten sebesar Rp18.693,02 miliar atau 72,20 persen dari pagu. Realisasi ini secara nominal turun 5,30 persen (y-o-y) meskipun meningkat secara persentase.

**Tabel II.1 Pagu dan Realisasi APBN-P Lingkup Provinsi Banten
s.d Akhir Triwulan III Tahun 2019 dan Tahun 2020**

(dalam miliar rupiah)

Uraian	Tahun 2019			Tahun 2020		
	APBN	Realisasi s.d 30 September	%	APBN	Realisasi s.d 30 September	%
A. PENDAPATAN NEGARA	62,079.45	30,712.64	49.47	49,934.84	30,440.31	60.96
I. Penerimaan Dalam Negeri	62,079.45	30,712.64	49.47	49,934.84	30,440.31	60.96
1. Penerimaan Perpajakan	60,485.61	28,811.50	47.63	47,273.67	28,711.41	60.73
2. PNPB	1,593.84	1,901.13	119.28	2,661.17	1,728.91	64.97
II. HBAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. BELANJA NEGARA	28,111.98	19,739.21	70.22	25,890.60	18,693.02	72.20
I. Belanja Pemerintah Pusat	10,980.96	6,948.14	63.27	10,308.26	5,986.16	58.07
1. Belanja Pegawai	3,648.54	2,755.44	75.52	3,873.38	2,758.14	71.21
2. Belanja Barang	5,464.96	3,431.94	62.80	4,704.37	2,507.41	53.30
3. Belanja Modal	1,856.42	754.09	40.62	1,709.85	716.60	41.91
4. Belanja Bantuan Sosial	11.05	6.67	60.38	20.66	4.01	19.42
II. TKDD	17,131.02	12,791.06	74.67	15,582.34	12,706.86	81.55
1. Transfer ke Daerah	16,038.94	12,140.35	75.69	14,472.91	11,920.17	82.36
a. Dana Perimbangan	15,864.01	11,969.89	75.45	14,073.18	11,682.89	83.02
1) Dana Bagi Hasil	1,724.51	1,121.52	65.03	1,819.30	1,335.19	73.39
2) Dana Alokasi Umum	8,870.70	7,236.64	81.58	7,989.74	6,681.17	83.62
3) Dana Alokasi Khusus	5,268.80	3,611.72	68.55	4,264.14	3,666.53	85.99
b. Dana Insentif Daerah	174.93	170.46	97.45	399.73	237.28	59.36
2. Dana Desa	1,092.07	650.71	59.58	1,109.43	786.68	70.91
C. SURPLUS DEFISIT	33,967.48	10,973.43	32.31	24,044.24	11,747.29	48.86

Sumber : LKPK/GFS, Simtrada & Kanwil DJP (diolah)

A. Pendapatan Negara

Pendapatan negara di Banten triwulan III-2020 seluruhnya merupakan pendapatan dalam negeri, yang berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp28.711,41 miliar (94,32 persen) dan PNBPN sebesar Rp1.728,91 miliar (5,68 persen).

1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan di Banten pada triwulan III-2020 turun 8,62 persen (y-o-y) dan terendah dalam 4 tahun terakhir. Pertumbuhan pajak perdagangan internasional sebesar 15,64 persen tidak mampu menutupi seluruh jenis perpajakan dalam negeri yang mengalami kontraksi imbas pandemi Covid-19.

Untuk itu kebijakan pemerintah memberikan relaksasi dan stimulus perpajakan kepada dunia usaha dalam menghadapi perekonomian yang menurun akibat pandemi covid-19 merupakan langkah yang tepat.

Tabel II.2 Realisasi Penerimaan Perpajakan Di Provinsi Banten s.d 30 September 2017-2020 (dalam miliar rupiah)

Uraian	Penerimaan Perpajakan s.d 30 September			
	2017	2018	2019	2020
A. Pajak Dalam Negara	28,371.67	27,230.25	27,132.24	23,753.12
1. Pajak Penghasilan (PPh)	14,365.42	14,782.63	15,965.44	13,947.27
a. PPh Migas	3.64	13.88	12.37	2.97
b. PPh Non-Migas	14,361.78	14,768.75	15,953.08	13,944.31
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	12,916.43	11,009.34	9,620.91	8,611.05
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.10	10.03	6.26	6.39
4. BPHTB	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Cukai	908.83	1,247.33	1,366.74	1,033.58
6. Pajak Lainnya	173.90	180.92	172.88	154.82
B. Pajak Perdagangan Internasional	3,795.90	4,435.28	4,287.66	4,958.29
1. Bea Masuk	3,795.80	4,435.27	4,287.65	4,958.29
2. Bea Cukai	0.10	0.01	0.01	0.00
Jumlah Penerimaan Perpajakan	32,167.57	31,665.53	31,419.90	28,711.40

Sumber : OMSPAN (LKPK)

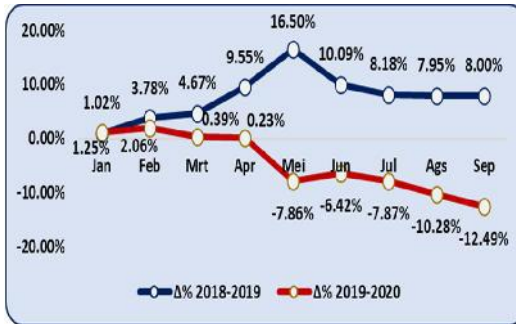
a) Pajak Penghasilan (PPh)

PPh merupakan kontributor utama sektor perpajakan dengan kontribusi 48,58 persen. Realisasi penerimaan PPh triwulan III-2020 sebesar Rp13.947,27 miliar melambat 4,43 persen dibandingkan tahun 2019. Pelambatan terjadi mulai bulan Maret 2020 dengan puncak pelambatan terjadi di bulan September 2020 sebesar 12,49 persen.

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Adalah kontributor terbesar setelah PPh dengan porsi 29,99 persen. Triwulan III-2020 penerimaan PPN sebesar Rp8.611,05 miliar, melambat 10,50 persen dibandingkan tahun 2019. Meskipun secara persentase mencatat pertumbuhan, tetapi sejak April sampai dengan September 2020 menunjukkan tren penurunan pertumbuhan.

Gambar II.1 Pertumbuhan Penerimaan PPh di Banten (dalam persen)



Gambar II.2 Pertumbuhan Penerimaan PPN di Banten (dalam persen)



Sumber : LKPK (diolah)

c) Pajak Bumi dan Bangunan

Penerimaan PBB triwulan III-2020 sebesar Rp6,39 miliar tumbuh 2,07 persen dibandingkan tahun lalu. Pertumbuhan terjadi pada pendapatan sektor pekebunan. Meskipun secara persentase meningkat tetapi tidak berpengaruh signifikan karena hanya berkontribusi 0,02 persen.

d) Penerimaan Cukai

Penerimaan cukai triwulan III-2020 sebesar Rp1.033,58 miliar, melambat -24,29 persen dibandingkan tahun lalu. Pelambatan penerimaan cukai terjadi mulai bulan Maret sampai dengan September 2020, puncaknya di bulan September 2020 sebesar 24,38 persen.

Gambar II.3 Pertumbuhan Penerimaan Cukai di Banten (dalam Persen)



Sumber : LKPK (diolah)

e) Penerimaan Bea Masuk

Dibanding tahun 2019, penerimaan bea masuk triwulan III-2020 meningkat 19,18 persen atau sebesar Rp4.958,29 miliar dan tertinggi dalam 3 tahun terakhir.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi PNBP Triwulan III-2020 di Banten sebesar Rp1.728,91 miliar, melambat 9,06 persen dibandingkan tahun 2019. Realisasi PNBP ini didominasi Pendapatan BLU dengan porsi 77,74 persen atau sebesar Rp1.344,14 miliar dan PNBP Lainnya dengan porsi 22,26 persen atau sebesar Rp384,77 miliar.



Penyumbang terbesar PNBPN pada triwulan ini berasal dari Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan dan Pendapatan Jasa Kepelabuhanan.

Tabel II.3 Perkembangan Penerimaan PNBPN Di Prov Banten s.d 30 September 2017-2020 (miliar rupiah)

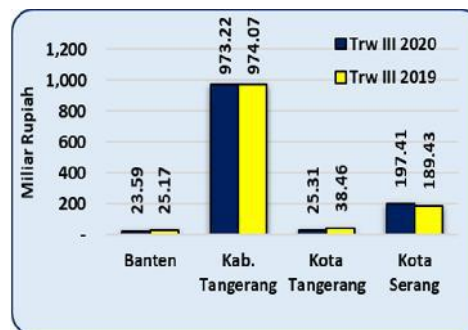
Uraian	Penerimaan PNBPN s.d 30 September			
	2017	2018	2019	2020
A. Penerimaan SDA	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Bagian Laba BUMN	0.00	0.00	0.00	0.00
C. PNBPN Lainnya	409.79	409.56	500.49	384.77
D. Pendapatan BLU	1,179.30	1,259.19	1,400.64	1,344.14
Jumlah	1,589.09	1,668.75	1,901.13	1,728.91

Sumber : LKPK (diolah)

a) Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan

Realisasi PNBPN jasa pelayanan pendidikan triwulan III-2020 sebesar Rp1.219,53 miliar, tumbuh negatif 0,62 persen dibanding tahun 2019. Pendapatan tertinggi berasal dari BLU Universitas Terbuka yang berlokasi di Kab. Tangerang dengan porsi 79,62 persen atau sebesar Rp970,96 miliar, disusul BLU Untirta yang berlokasi di Kota Serang dengan Porsi 12,21 persen atau sebesar Rp148,90 miliar.

Gambar II.4 Realisasi PNBPN Jasa Pelayanan Pendidikan di Banten



Sumber : LKPK (diolah)

b) Pendapatan Jasa Kepelabuhanan

Penerimaan PNBPN Pendapatan Jasa Kepelabuhanan triwulan III-2020 di Banten sebesar Rp85,77 miliar, tumbuh 6,79 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, 94,53 persen pendapatan ini berasal dari Kabupaten Serang, dengan pintu masuk utama adalah Pelabuhan Merak.

Gambar II.5 Realisasi PNBPN Kepelabuhanan di Banten



Sumber : LKPK (diolah)

B. Belanja Negara

1. Belanja Pemerintah Pusat

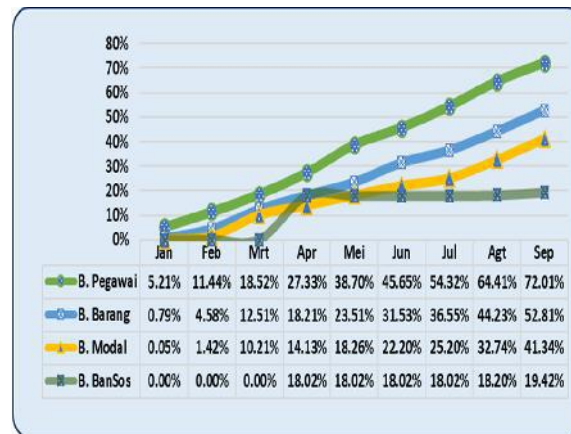
Penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat di Banten mencapai Rp5.986,16 miliar atau 58,07 persen dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp10.308,26 miliar.

Secara prosentase masih di bawah target penyerapan nasional sebesar 60 persen dan lebih rendah dibandingkan tahun 2019 sebesar 63,27 persen. Penyerapan signifikan semua jenis belanja terjadi pada bulan Agustus yang dapat diindikasikan bahwa akselerasi belanja

dalam meminimalkan dampak Covid-19 sudah mulai terlihat.

Sampai triwulan III-2020 nominal realisasi tertinggi adalah belanja pegawai sebesar Rp2.758,14 miliar, belanja barang sebesar Rp2.507,41 miliar, belanja modal sebesar Rp716,60 miliar dan belanja bantuan sosial sebesar Rp4,01 miliar.

Gambar II.6 Tren Realisasi Belanja Pempus di Provinsi Banten Tahun 2020



Sumber: LKPK (diolah)

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

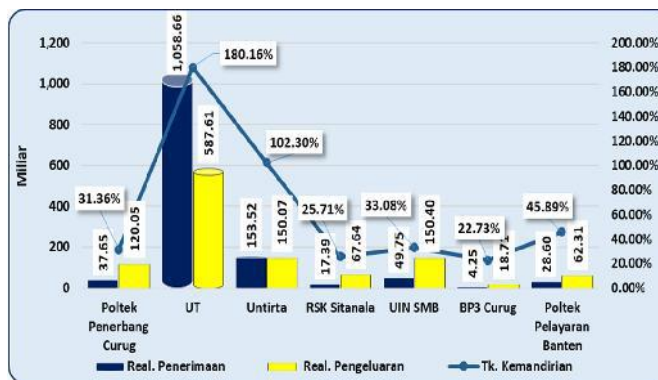
TKDD yang ditetapkan dalam APBN 2020 untuk Pemda di Banten sebesar Rp15.582,34 miliar, sampai dengan triwulan III-2020 telah disalurkan sebesar Rp12.706,86 miliar atau 81,55 persen. Secara persentase penyaluran tertinggi dilakukan untuk DAK Fisik sebesar 94,84 persen, kemudian DAU sebesar 83,62 persen. Sedangkan penyaluran terendah adalah Dana Desa dengan penyaluran 70,91 persen dari pagu, penyebabnya adalah belum berakhirnya batas waktu penyaluran Dana Desa tahap III yaitu di bulan Desember 2020 sehingga pemerintah daerah masih berusaha memenuhi dokumen yang dipersyaratkan.

Dalam rangka membantu mengurangi dampak pandemi covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada penduduk miskin menggunakan dana desa dengan besaran Rp.600 ribu per bulan per keluarga selama 6 bulan. Sampai dengan 30 September 2020 dari total pagu Rp.1.109,43 miliar telah terealisasikan Rp.786,68 miliar atau 70,91 persen.

3. Pengelolaan BLU

Universitas Terbuka merupakan satker BLU di Banten dengan pagu tertinggi sebesar Rp1.377,98 miliar atau 54,26 persen dari seluruh pagu satker BLU. Penyerapan tertinggi satker BLU secara persentase pada triwulan III-2020 adalah BP3 Curug (59,16 persen), sedangkan terendah ada pada Rumah Sakit Kusta Sitanala sebesar 35,09 persen. Untuk tingkat kemandirian yang dinilai dari kemampuan BLU membiayai pengeluaran dengan penerimaan fungsionalnya, tertinggi adalah Universitas

Gambar II.7 Realisasi Penerimaan, Pengeluaran dan Tingkat Kemandirian BLU di Banten



Sumber : OM SPAN

Terbuka (180,16 persen), sedangkan terendah adalah BP3 Curug (22,73 persen).

4. Manajemen Investasi Pusat

Realisasi penyaluran KUR di Banten sampai dengan triwulan III-2020 sebesar Rp2.741,23 miliar yang diberikan kepada 83.818 debitur. Sebanyak 61,86 persen penyaluran KUR diserap oleh 3 daerah yaitu : Kota Tangerang, Kab. Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Ketiga daerah tersebut adalah daerah yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta, memiliki UMKM yang lebih *bankable*

Tabel II.4 Realisasi Penyaluran KUR & UMi Per Wilayah Triwulan III-2020 di Banten

No	Kabupaten/Kota	Realisasi Penyaluran KUR			Realisasi Penyaluran UMi		
		Akad	Debitur	Rata-rata Debitur	Akad	Debitur	Rata-rata Debitur
1	3601 - Kab. Pandeglang	221,635,401,011	10,202	21,724,701	2,119,400,000	852	2,487,559
2	3602 - Kab. Lebak	259,575,492,079	12,936	20,066,133	2,396,800,000	1,092	2,194,872
3	3603 - Kab. Tangerang	503,873,904,735	18,409	27,371,063	16,389,700,000	4,247	3,859,124
4	3604 - Kab. Serang	216,027,017,943	11,464	18,843,948	15,428,756,000	4,577	3,370,932
5	3671 - Kota Tangerang	461,374,512,004	10,878	42,413,542	4,188,387,611	1,451	2,886,552
6	3672 - Kota Cilegon	168,604,971,835	4,512	37,368,123	1,027,000,000	252	4,075,397
7	3673 - Kota Serang	179,560,134,357	6,532	27,489,304	8,272,200,000	2,847	2,905,585
8	3674 - Kota Tangsel	730,577,091,089	8,885	82,225,897	12,442,800,000	3,590	3,465,961
JUMLAH		2,741,228,525,053	83,818		62,265,043,611	18,908	

Sumber : SIKP (diakses 5 Nov 2020)

dibandingkan daerah lain. Sedangkan realisasi penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi) sampai dengan triwulan III-2020 sebesar Rp62,27 miliar kepada 18.908

debitur. Sebanyak 51,10 penyaluran pembiayaan UMi didominasi oleh dua daerah yaitu Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang. Terkait penyaluran KUR, kiranya diperlukan peningkatan komitmen pemda dalam mencari, memverifikasi, meng-upload calon debitur yang merupakan UMKM binaan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) sehingga penyaluran KUR dapat lebih tepat sasaran.

C. Prognosis Realisasi APBN

Berdasarkan *trend analysis* atas data periode Januari sampai dengan September 2020, dengan mempertimbangkan bahwa ekonomi di Banten triwulan IV-2020 diharapkan akan *rebound* karena telah berakhirnya kebijakan PSBB. Pertumbuhan ekonomi tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan pajak. Dari sisi belanja negara, terdapat percepatan penyaluran dana transfer serta pembayaran gaji ke-13 ASN, maka prognosis APBN triwulan IV-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel II.5 Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Banten
Triwulan IV Tahun 2020 (dalam miliar rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Trw II		Perkiraan Realisasi Triwulan IV	
		Rp	persen Realisasi Terhadap Pagu	Rp	persen Perkiraan Realisasi Terhadap Pagu
Pendapatan Negara	49.934,84	21.168,70	42,39%	41.916,61	83,94%
Belanja Negara	23.439,23	12.615,91	53,82%	21.389,07	91,25%
Surplus/Defisit	26.495,61	8.552,79	32,28%	20.527,54	77,48%

III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pagu dan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Banten sampai dengan triwulan III-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel III.1 Pagu Realisasi APBD Triwulan III Tahun 2018 – 2020
(miliar rupiah)

URAIAN	TRIWULAN III 2018		TRIWULAN III 2019		TRIWULAN III 2020	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
PENDAPATAN	32,817.28	21,789.14	36,546.01	25,659.13	32,312.69	23,831.62
PENDAPATAN ASLI DAERAH	13,712.17	9,552.92	15,953.58	11,121.64	12,506.47	9,866.88
Pendapatan Pajak Daerah	10,927.65	8,154.74	13,134.14	9,712.54	10,262.77	8,235.05
Pendapatan Retribusi Daerah	390.13	240.99	405.21	224.09	330.33	239.80
Pendapatan Hasil Pengelolaan Lain-lain PAD yang sah	172.89 2,221.51	147.18 1,010.02	176.90 2,237.33	146.52 1,038.49	168.94 1,744.43	170.70 1,221.33
PENDAPATAN TRANSFER	18,489.70	12,128.78	19,624.11	14,291.03	18,563.70	13,616.27
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perim	14,827.49	10,020.07	15,810.86	11,780.31	14,498.11	11,624.10
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	1,087.01	683.90	1,267.01	821.17	1,577.74	765.02
Transfer Pemerintah Provinsi	2,280.21	1,261.66	2,301.24	1,505.14	2,080.85	869.15
Transfer Bantuan Keuangan	295.00	163.15	245.00	184.40	407.00	358.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	615.40	107.44	968.32	246.46	1,242.52	348.47
Pendapatan Hibah	615.40	107.44	968.32	245.81	1,242.52	347.70
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	-	-	-	0.65	-	0.77
BELANJA	32,364.93	16,774.17	35,125.94	18,553.01	30,774.60	16,939.58
BELANJA OPERASI	23,934.22	14,446.42	27,082.16	15,955.37	24,173.21	14,405.38
Belanja Pegawai	10,807.71	7,273.62	12,460.27	7,977.80	11,402.09	7,480.92
Belanja Barang	10,155.06	5,080.20	11,746.43	6,045.66	9,536.22	5,386.75
Belanja Bunga	-	-	-	-	10.15	0.05
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	2,824.17	2,049.02	2,702.68	1,817.90	3,100.47	1,510.49
Belanja Bantuan Sosial	146.13	42.91	171.62	112.37	124.27	27.17
Belanja Bantuan Keuangan	1.15	0.67	1.15	1.64	-	-
BELANJA MODAL	8,338.75	2,315.73	7,905.20	2,589.85	4,550.58	1,753.84
Belanja Tanah	1,402.87	284.03	1,276.78	466.39	610.40	248.82
Belanja Perlatan dan Mesin	1,070.54	359.90	1,322.41	338.43	920.51	345.08
Belanja Gedung dan Bangunan	2,414.48	490.74	2,047.62	571.33	1,711.03	573.36
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,244.58	1,122.77	2,962.82	1,099.89	1,153.69	495.63
Belanja Aset Tetap Lainnya	143.91	57.51	207.38	93.02	88.89	63.36
Belanja Aset Lainnya	28.60	0.78	54.29	19.25	45.04	19.33
Belanja Modal BLUD	33.76	-	33.91	1.53	21.01	8.26
BELANJA TIDAK TERDUGA	91.97	12.03	138.58	7.79	2,050.81	780.36
Belanja Tidak Terduga	91.97	12.03	138.58	7.79	2,050.81	780.36
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	4,458.57	4,632.08	5,023.32	2,932.50	3,768.99	2,323.88
Transfer Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/K	2,421.41	2,386.97	2,885.12	1,728.11	1,671.54	1,140.76
Transfer Bantuan Keu Kepada Prov/Kab	1,670.80	1,385.61	1,857.32	1,195.76	1,816.61	1,166.80
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	366.36	859.50	280.87	8.63	280.84	16.33
SURPLUS / (DEFISIT)	(4,006.23)	382.89	(3,603.25)	4,173.63	(2,230.90)	4,568.16

Sumber : Pemda di Banten dan DJPK (data diolah)

Target pendapatan dan belanja triwulan III-2019 meningkat dari periode sebelumnya (y-o-y) tetapi adanya pandemi Covid-19, target dan realisasi diturunkan pada triwulan

III-2020. Untuk realisasi pendapatan dua periode sebelumnya berkisar 66 persen sampai 70 persen. Sedangkan realisasi belanja walaupun sudah di tri wulan III hanya terserap di kisaran 50 persen. Rendahnya penyerapan anggaran di triwulan III mengindikasikan akan terjadi penumpukan realisasi belanja di saat akhir tahun. Di satu sisi perhitungan secara persentase menunjukkan surplus pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran.

A. PENDAPATAN DAERAH

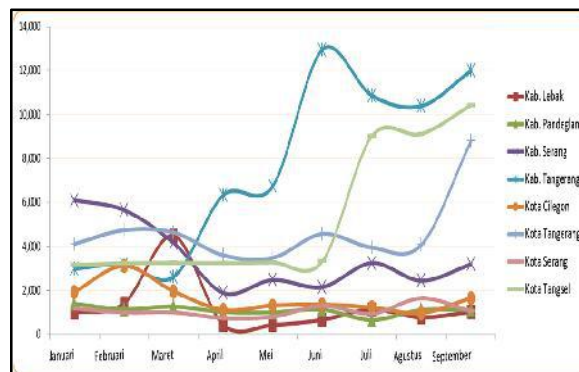
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi penerimaan PAD di Banten secara agregat sampai dengan triwulan III-2020 sebesar Rp9.866,88 miliar atau 78,89 persen dari target. Realisasi penerimaan PAD tumbuh melambat 11,28 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019, Melambatnya realisasi PAD antara lain menurunnya capaian pendapatan pajak daerah.

a) Penerimaan Pajak Daerah

Realisasi penerimaan pajak daerah di wilayah Banten triwulan III-2020 sebesar Rp8.235,05 miliar atau 80,24 persen dari target. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019, nilai nominal realisasi ini melambat sebesar

Gambar III.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Banten Triwulan III-2020 (dalam juta rupiah)



Sumber : Pemda di Banten

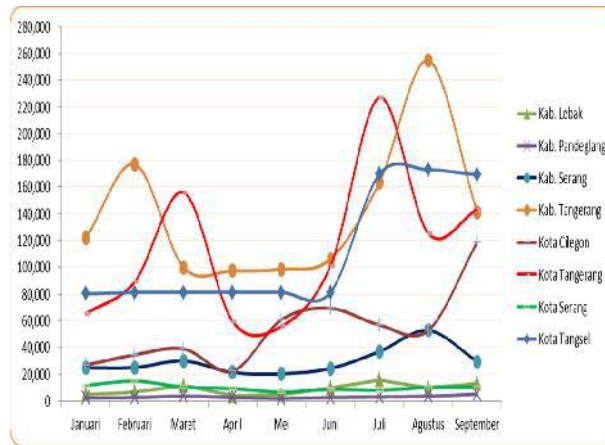
15,21 persen. Realisasi pajak daerah terbesar terdapat pada Pemda Kab. Tangerang sebesar Rp1.260,29 miliar diikuti Kota Tangerang sebesar Rp1.022,92 miliar dan Kota Tangerang Selatan Rp998,46 miliar. Sumber tertinggi pajak daerah Kab Tangerang adalah Pajak BPHTB dan PBB. Pandeglang merupakan daerah realisasi pajak terendah sebesar Rp28,01 miliar.

b) Penerimaan Retribusi Daerah

Realisasi penerimaan retribusi daerah sampai dengan triwulan III-2020 sebesar Rp239,80 miliar atau 72,59 persen dari target dan tumbuh 7,01 persen (y-o-y).

Realisasi tertinggi adalah Kab. Tangerang sebesar Rp68,05 miliar atau 28,38 persen dari total realisasi penerimaan retribusi di Banten. Kontribusi tertinggi diperoleh dari penerimaan Retribusi IMB sebesar Rp40,75 miliar. Sebaliknya Kota Serang merupakan daerah dengan realisasi penerimaan retribusi terendah yaitu Rp9,71 miliar dengan porsi hanya 4,05 persen.

Gambar III.2 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kab/Kota di Banten Triwulan III-2020 (juta rupiah)

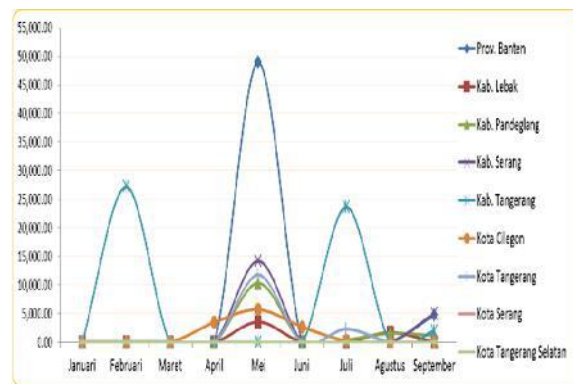


Sumber : Pemda wilayah Banten, DJPK data diolah

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan s.d. triwulan III-2020 sebesar Rp170,70 miliar atau 101,04 persen dari target. Realisasi penerimaan terbesar yaitu Provinsi Banten sebesar Rp53,78 miliar atau 31,51 persen, Kabupaten Tangerang Rp52,86.

Gambar III.3 Realisasi Penerimaan HKD yang Dipisahkan Kabupaten/Kota di Banten Triwulan III 2020 (juta rupiah)

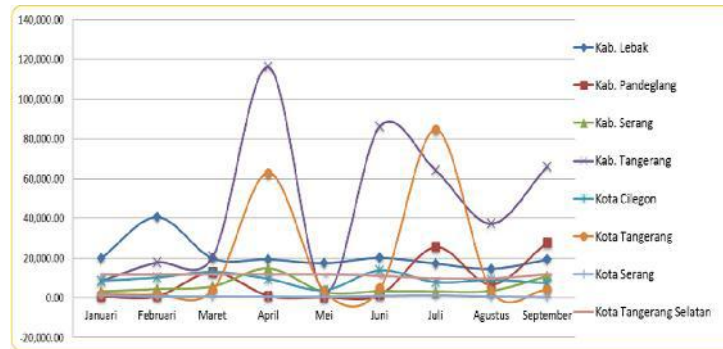


Sumber : Pemda wilayah Banten, DJPK data

d) Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah

Realisasi Penerimaan lain-lain PAD yang sah s.d. triwulan III-2020 sebesar Rp1.221,33 miliar atau 70,01 persen dari target. Penerimaan LLPD yang sah terbesar yaitu Kab. Tangerang sebesar Rp419.023,84 miliar atau 34,31 persen dari total penerimaan LLPD yang Sah.

Gambar III.4 Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten/Kota di Banten Triwulan III-2020 (iuta rupiah)



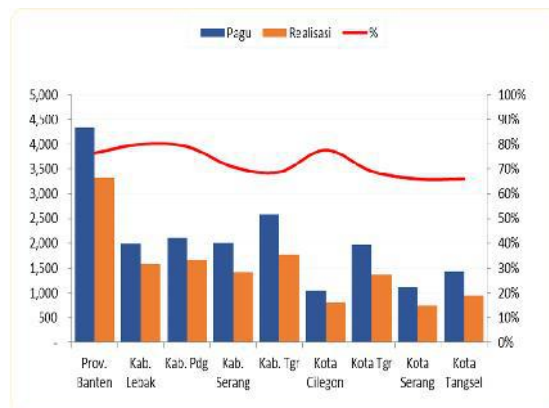
Sumber : Pemda wilayah Banten, DJPK (diolah)

2. Pendapatan Transfer

Realisasi pendapatan transfer sampai dengan triwulan III-2020 mencapai Rp13.616,29 atau 73,35 persen dari target. Realisasi pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer pusat (dana perimbangan) yaitu sebesar 85,37 persen, transfer pemerintah provinsi (6,38 persen), transfer pemerintah pusat lainnya (5,62 persen) dan bantuan keuangan (2,63 persen). Porsi Dana Perimbangan terdiri dari DBH (11,39 persen), DAU (57,16 persen), DAK (31,46 persen).

Realisasi nominal pendapatan transfer tertinggi yaitu Kabupaten Pandeglang sebesar Rp1.667,40 miliar (88,30 persen) diikuti Kota Serang sebesar Rp739,71 miliar (87,35 persen) dan Kabupaten Lebak sebesar Rp1.585,39 miliar (81,75 persen). Hal ini menunjukkan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Pandeglang, Kota

Gambar III.5 Realisasi Pendapatan Transfer Daerah Kab/Kota Triwulan III 2020 (miliar rupiah dan persen)



Sumber : Pemda wilayah Banten, DJPK (diolah)

Serang dan Kabupaten Lebak masih rendah dengan sumber pendapatan daerah terbesar dari dana transfer sedangkan pendapatan PAD relatif kecil dan tidak mencukupi kebutuhan belanjanya. Sedangkan nominal pendapatan terendah Kota Tangerang Selatan sebesar Rp946,29 miliar (43,82 persen) diikuti Kabupaten Tangerang sebesar Rp1.769,65 miliar (49,57 persen).

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

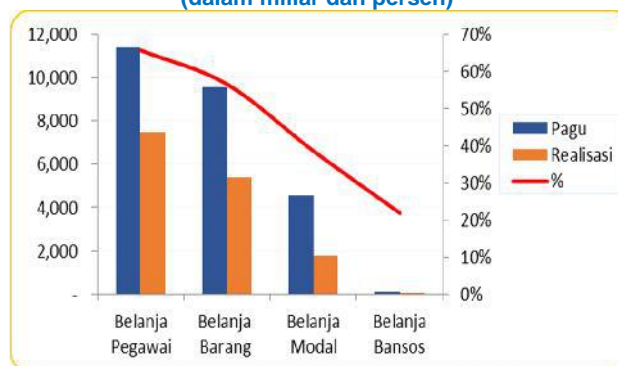
Total realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lingkup Provinsi Banten s.d. triwulan III-2020 sebesar Rp348,47 miliar atau 28,05 persen dari target. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 LLPD yang sah tumbuh sebesar 41,39 persen. Porsi realisasi nominal LLPD yang sah terbesar pada Kota Tangerang sebesar Rp108,84 miliar (31,23 persen) diikuti Kabupaten Pandeglang sebesar Rp92,58 miliar (26,57 persen) dan Kabupaten Lebak sebesar Rp69,39 miliar (19,91 persen).

B. Belanja Daerah

1. Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Bansos

Penyerapan jenis belanja di Provinsi Banten s.d triwulan III-2020 secara agregat sebesar Rp14.648,68 miliar atau 57,19 persen dari target, melambat 12,4 persen (y-o-y). Rincian penyerapan yaitu belanja pegawai (51,07 persen), belanja barang dan jasa (36,77

Gambar III.6 Pagu dan Realisasi Belanja Provinsi Banten s.d. Triwulan III-2020 (dalam miliar dan persen)



Sumber : Pemda wilayah Banten, DJPK (diolah)

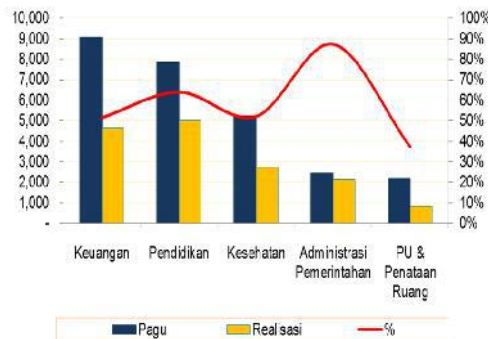
persen), belanja modal (11,97 persen) dan belanja bansos (0,19 persen). Kabupaten Tangerang melakukan penyerapan paling tinggi sebesar Rp2.499,21 miliar atau 61,77 persen, sedangkan yang terendah adalah Kota Serang sebesar Rp714,01 miliar atau 50,83 persen. Penyerapan belanja pegawai melambat 6,2 persen, belanja barang 10,9 persen, belanja modal 32,3 persen (y-o-y). dan belanja bansos melambat 75,8 persen.

2. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan

Berdasarkan urusan dalam wilayah Provinsi Banten terdapat lima besar urusan dengan alokasi pagu tertinggi, dengan persentase realisasi urusan Keuangan (26,25 persen), Pendidikan (22,70 persen), Kesehatan (15,21 persen), Adminitrasi Pemerintahan (7,04 persen) dan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (6,33 persen).

Dibandingkan periode yang sama tahun 2019 capaian realisasi urusan keuangan meningkat 3,53 persen dan urusan kesehatan 2,25 persen. Hal ini menunjukkan kebutuhan masyarakat akan keuangan dan kesehatan meningkat seiring dengan pandemi COVID-19. Realisasi urusan Pendidikan tertinggi yaitu Provinsi Banten (Rp1.164,04 miliar) dan terendah Kota Cilegon

Gambar III.7 Pagu dan Realisasi Belanja Prov. Banten s.d. triwulan III-2020 (dalam miliar dan persen)



Sumber : Pemda wilayah Banten, DJPK (diolah)

terendah Kota Cilegon (Rp219,19 miliar). Dan realisasi belanja urusan kesehatan tertinggi Kabupaten Tangerang (Rp539,16 miliar) dan realisasi terendah Kota Serang (Rp69,86 miliar).

C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020

Berdasarkan trend realisasi APBD wilayah Banten dari tahun 2014-2019, maka dapat diperoleh rata-rata kenaikan pendapatan (10,9 persen) dan belanja (16,1persen). Perkiraan pendapatan dan belanja daerah sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel III.2 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Banten s.d. Triwulan IV-2020

Uraian	Pagu	Perkiraan Realisasi TW III 2020		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV 2020	
		Rp	% Realisasi Terhadap Pagu	Rp	% Realisasi Terhadap Pagu
Pendapatan Daerah	32,312.69	23,831.62	74%	26,429.81	82%
Belanja Daerah	34,543.59	19,263.46	56%	22,373.72	65%
Surplus/Defisit	-2,230.90	4,568.16		4,056.09	

Sumber : Pemda wilayah Banten dan DJPK (diolah)

IV. PERKEMBANGAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasi

Pendapatan Negara konsolidasi triwulan III 2020 sebesar Rp40.348,21 miliar, turun 4,11 persen, sedangkan Belanja Negara konsolidasian sebesar Rp24.032,76 miliar turun 10,76 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019.

**Tabel IV.1 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Banten
Untuk periode s.d. Triwulan III Tahun 2020 (miliar rupiah)**

Uraian	2020					2019
	Pusat	Daerah	Eliminasi	Konsolidasi	Kenaikan	Konsolidasi
Pendapatan Negara	30.440,31	22.408,49	12.500,59	40.348,21	-4,11	42.076,32
Pendapatan Perpajakan	28.711,41	8.235,05	0,00	36.946,46	-4,10	38.524,04
Pendapatan Bukan Pajak	1.728,91	1.436,61	111,46	3.054,06	-6,90	3.280,57
Hibah	0,00	347,70	0,00	347,70	0,00	245,81
Transfer	0,00	12.389,13	12.389,13	0,00	0,00	25,90
Belanja Negara	18.693,02	17.840,33	12.500,59	24.032,76	-10,76	26.929,27
Belanja Pemerintah	5.986,16	16.939,58	0,00	22.925,74	-10,10	25.501,15
Belanja Pegawai	2.758,14	7.480,92	0,00	10.239,06	-4,60	10.733,25
Belanja Barang	2.507,41	5.386,75	0,00	7.894,17	-16,71	9.477,60
Belanja Modal	716,60	1.753,84	0,00	2.470,44	-26,12	3.343,93
Hibah	0,00	1.510,49	0,00	1.510,49	-17,91	1.840,06
Bantuan Sosial	4,01	27,17	0,00	31,18	-68,36	98,53
Belanja Lain-lain	0,00	780,41	0,00	780,41	9922,20	7,79
Transfer	12.706,86	900,75	12.500,59	1.107,02	-22,48	1.428,12
Surplus (Defisit)	11.747,29	4.568,16	0,00	16.315,45	7,71	15.147,05
Pembiayaan	0,00	2.460,84	0,00	2.460,84	-4,39	2.573,72
Penerimaan Pembiayaan Daerah	0,00	2.527,84	0,00	2.527,84	-2,93	2.604,22
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	67,00	0,00	67,00	119,67	30,50
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	11.747,29	7.029,00	0,00	18.776,29	5,96	17.720,78

Sumber : LKPK Kanwil DJPb Provinsi Banten (diolah)

Penurunan pendapatan negara dan belanja triwulan III-2020 menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp16.315,45 miliar, naik Rp1.168,40 miliar dari periode yang sama tahun 2019. Sedangkan sisa Lebih Pembiayaan Anggaran triwulan III-2020 turun sebesar 4,39 persen dibanding periode yang sama tahun 2019.

B. Pendapatan Konsolidasian

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Pendapatan pemerintah konsolidasian terdiri dari penerimaan perpajakan, PNBP, hibah dan transfer dana bantuan ke desa. Total pendapatan konsolidasian

pemerintah pusat dan pemerintah daerah triwulan III-2020 sebesar Rp40.348,21 miliar. Dari angka tersebut, 57,60 persen merupakan pendapatan Pemerintah Pusat

Gambar IV.1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian Triwulan III Tahun 2019 dan 2020



Sumber : LKPK Kanwil (diolah)

dan 42,40 persen pendapatan Pemerintah Daerah. Pendapatan Pemerintah Pusat tersebut selanjutnya didistribusikan kepada Pemerintah Daerah berupa dana transfer maupun belanja pemerintah pusat di daerah berupa belanja Dekon/TP/UB. Pendapatan konsolidasian triwulan III-2020 masih didominasi oleh pendapatan perpajakan sebesar 91,57 persen, sedang proporsi pendapatan bukan pajak dan hibah masing-masing hanya sebesar 7,57 persen dan 0,86 persen dari total pendapatan konsolidasian. Penerimaan perpajakan konsolidasian triwulan III-2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.577,59 miliar (4,10 persen) dibanding periode yang sama tahun 2019. Menurunnya kinerja penerimaan pajak triwulan III-2020 dipengaruhi oleh adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berimbas pada berkurangnya kegiatan perekonomian yang berarti berkurangnya juga pendapatan perpajakan.

Pendapatan perpajakan konsolidasian pada triwulan III-2019 dan 2020 didominasi oleh penerimaan pajak dalam negeri (pajak pusat) yang ditopang dari pajak pusat dan pajak daerah berupa pendapatan PPH Pasal 21, PPN Dalam Negeri, Pajak Kendaraan Bermotor, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan PBB Pedesaan dan Perkotaan. Kontribusi keempatnya mencapai 54,42 persen terhadap pendapatan perpajakan konsolidasian. Realisasi Hibah konsolidasian triwulan III-2020 meningkat dibanding periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp101,89 miliar (naik 41,45 persen). Kenaikan ini dipengaruhi meningkatnya Hibah dari Pemerintah Pusat berupa bantuan penanganan Covid-19.

2. Analisis Perubahan

Struktur pendapatan konsolidasian triwulan III-2020 mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu mengalami penurunan 4,11 persen. Sektor pendapatan perpajakan masih menjadi pendorong utama pendapatan konsolidasian Banten meskipun mengalami penurunan. Penurunan Pajak ini sebagai akibat dari dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyaknya perusahaan yang tutup dan pemutusan hubungan kerja serta adanya kebijakan PSBB yang membatasi ruang gerak masyarakat dalam beraktifitas.

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian

PDRB Provinsi Banten (ADHK) triwulan III-2020 mencapai Rp109.490,45 miliar dengan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 5,77 persen. Pada triwulan III-2020 terdapat penurunan penerimaan perpajakan sebesar 4,10 persen dibanding periode yang sama tahun 2019, hal ini selaras dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi dari 5,41 persen pada triwulan III-2019 menjadi -5,77 persen pada triwulan III-2020.

Tabel IV.2 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pemus dan Pemda di Wilayah Prov Banten Triwulan III Tahun 2019 dan 2020

Uraian	2019	2020	
	Realisasi	Realisasi	Kenaikan
Penerimaan Perpajakan	38.524.044.125.884	36.946.456.778.166	-4,10%
PNBP	3.280.568.183.480	3.054.056.816.086	-6,90%
Total	41.804.612.309.364	40.000.513.594.252	-4,32%
PRDRB/Pert.Ek Tw III	116.192.336.510.916	109.490.452.271.702	-5,77%

Sumber : LKPK Kanwil DJPb Banten, BPS Banten

C. Belanja Konsolidasian

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Belanja Kosolidasian Banten didominasi oleh Belanja Operasional sebesar Rp20.455,30 miliar atau 89,22 persen, sedangkan belanja modal sebesar Rp2.470, 44 miliar atau 10,78 persen dari total belanja konsolidasian. Dibanding triwulan III-2019 belanja modal triwulan III-

Gambar IV.2 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemda Terhadap Belanja dan Transfer Konsolidasian Pada Provinsi Banten 2020



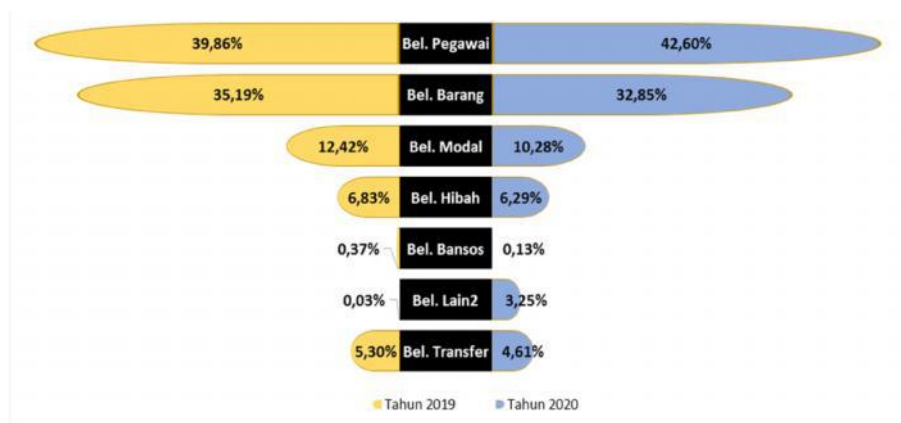
Sumber : LKPK Kanwil DJPb Prov Banten

2020 turun Rp873,49 miliar. Hal ini sebagai akibat dari adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19. Dilihat dari porsinya, Belanja Pemerintah Pusat lebih besar dibanding porsi Belanja Pemerintah Daerah terutama untuk belanja Transfer Pempus sebesar Rp12.706,86 miliar (93,38 persen), dan Pemda sebesar Rp900,75 miliar (6,62 persen) dari belanja transfer konsolidasian. Hal ini mencerminkan pemda dalam pembiayaan pemerintahannya masih mengandalkan dana transfer. Dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional, dana transfer tersebut dialokasikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai pada masyarakat terdampak Covid-19.

2. Analisis Perubahan

Realisasi belanja konsolidasian s.d. triwulan III-2020 mengalami penurunan di semua jenis belanja sebesar Rp2.896,51 miliar atau 10,76 persen (y-o-y). Hanya Belanja Lain-Lain (Belanja Tak Terduga) tumbuh sebesar Rp772,63 miliar yang direalisasikan untuk *refocusing* penanganan Covid-19.

Gambar IV.3 Perbandingan Realisasi Belanja Konsolidasian Provinsi Banten Tahun 2019-2020



Sumber: LKPK Kanwil DJPb Provinsi Banten (diolah)

Komposisi belanja konsolidasian triwulan III-2019 dan triwulan III-2020 masih didominasi belanja pegawai dan barang meskipun mengalami penurunan. Indikasinya terkait kebijakan pemotongan belanja pegawai dan berkurangnya operasional perkantoran akibat kebijakan *Work From Home* (WFH).

3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Kepada Indikator Ekonomi Regional

Perekonomian makro suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Kemiskinan. Belanja pemerintah sampai triwulan III-2020 mengalami penurunan 10,76 persen, sehingga berakibat *multiplier*

effect belanja negara kurang signifikan menstimulasi perekonomian makro Provinsi Banten.

Tabel IV.3 Rasio Indikator Ekonomi Makro Provinsi Banten Tahun 2020

Uraian	2019	2020	Ratio Perbandingan	Keterangan
Belanja	26.929,27	24.032,76	-10,76%	dalam miliar rupiah
PDRB (ADHB) Triwulan III	168.987,56	155.077,25	-8,23%	dalam triliun rupiah
PDRB Semester I 2018	200,94	212,48	5,75%	dalam triliun rupiah
IPM	71,95	72,44	0,68%	Indeks IPM 2019 dirilis Februari 2020
Kemiskinan	5,09%	5,92%	-0,83 poin	data angka kemiskinan Maret 2019 & Maret 2020
Terbuka (TPT)	8,11%	10,64%	-2,53	Data TPT Agustus 2020

Sumber : LKPK Kanwil Provinsi Banten dan BPS Banten (diolah)

D. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Provinsi Banten pada triwulan III 2020 (ADHB) sebesar Rp.155.077,25 miliar. Berdasarkan Laporan Operasional GFS konsumsi pemerintah (G) yang dihitung dari akumulasi komposisi pegawai, pengadaan barang dan jasa, konsumsi aset tetap selama triwulan III 2020

sebesar Rp21.562,26 miliar, sehingga kontribusi belanja pemerintah terhadap PDRB triwulan III-2020 sebesar 13,90 persen. Sedangkan kontribusi pemerintah terhadap PDRB dari investasi pemerintah dicerminkan dari nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto atau Nilai Transaksi Aset Non Keuangan Netto pada LO yaitu sebesar Rp2.470,44 miliar (1,59 persen). Meskipun kontribusi belanja dan

Tabel IV.4 Ringkasan LO Provinsi Banten Triwulan III-2020

Transaksi yang mempengaruhi kekayaan neto		
Pendapatan:		59.041.231.370.030,0
a.	Pajak	36.945.507.488.675,0
b.	Kontribusi Sosial	-
c.	Hibah	339.120.220.321,0
d.	Pendapatan lain	21.756.603.661.034,0
Beban:		21.562.317.755.878,0
a.	Kompensasi pegawai	10.585.609.147.082,0
b.	Penggunaan barang dan jasa	7.293.782.865.712,0
c.	Konsumsi aset tetap	-
d.	Bunga	54.218.542,0
e.	Subsidi	-
f.	Hibah	1.606.614.240.439,0
g.	Manfaat sosial	31.176.154.057,0
h.	Beban lainnya	2.045.081.130.046,0
Keseimbangan operasi bruto/neto		37.478.913.614.152,0
Transaksi Aset Non Keuangan Netto		2.470.442.426.715,0
a.	Aset tetap	2.198.383.262.655,0
b.	Persediaan	-
c.	Barang berharga	-
d.	Aset nonproduksi	272.059.164.060,0
Net Lending/Borrowing		35.008.471.187.437,1
Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban		34.990.071.187.437,1
a.	Akuisisi Neto Aset Keuangan	34.990.071.187.437,1
	-Domestik	34.990.071.187.437,1
	-Luar Negeri	-
b.	Keterjadian Kewajiban	(18.400.000.000,0)
	-Domestik	(18.400.000.000,0)
	-Luar Negeri	-

Sumber : LKPK Kanwil DJPb Banten (diolah)

investasi pemerintah terhadap PDRB relatif kecil tetapi pengeluaran tersebut menjadi trigger dan memiliki multiplier effect bagi komponen pembentuk PDRB. Dilihat dari data

BPS, PDRB triwulan III 2020 mengalami kontraksi 5,77 persen. Meskipun terkoreksi, perekonomian Banten masih tetap dipengaruhi oleh Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi Swasta, sehingga untuk meningkatkan keterpurukan perekonomian Banten diperlukan kebijakan yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan kemudahan investasi.

V. BERITA FISKAL REGIONAL TERPILIH

A. Program Kartu Prakerja, akselerator Inklusi Keuangan dan Pemulihan Ekonomi di Banten

Sampai dengan 30 September 2020, Pemerintah telah menyalurkan dana kartu prakerja *batch* 1 sampai 9 dengan total realisasi Rp19.457.273.100.000,00. Dari nilai tersebut 5,09 persen atau setara Rp989.722.250.000,00 disalurkan di Provinsi Banten dengan menjangkau 278.795 orang. Penerima manfaat kartu prakerja akan memperoleh dana sebesar Rp3.550.000,00 yang sebagian diantaranya untuk mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi sebagai pekerja maupun wira usaha. Berdasarkan survei evaluasi Kartu Prakerja³ sebanyak 74 persen peserta belum pernah mendapatkan pelatihan kerja apa pun selama hidupnya. Dengan pelatihan, sekitar 58 persen peserta mampu meningkatkan atau mempertahankan status bekerja di tengah situasi kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Dengan bekerja atau berwira usaha akan memperoleh penghasilan yang dapat mendorong peningkatan konsumsi dalam negeri. Dalam skala besar bersama dengan paket kebijakan fiskal dan moneter lainnya, program kartu prakerja secara komprehensif akan mendorong pemulihan ekonomi di Banten.

Penyaluran dana kartu prakerja dilakukan melalui platform keuangan digital antara lain yakni LinkAja, BNI, OVO, dan Gopay. Seperti diketahui, dana insentif langsung dikirimkan secara virtual lewat rekening bank atau akun dompet digital (*e-wallet*) para peserta pelatihan Kartu Prakerja. Saat ini penyaluran dana program kartu prakerja di Banten telah sepenuhnya (100 persen) dengan platform digital setelah manajemen kartu prakerja menggandeng layanan keuangan digital DANA. Langkah ini diharapkan berkontribusi dalam menjaga tren kenaikan indeks inklusi keuangan masyarakat Banten yang pada Survey Nasional Literasi Keuangan OJK 2016 sebesar 69,45 persen kemudian survey 2019 berada di atas indeks nasional 76,19 persen⁴. Otoritas Jasa Keuangan mengartikan inklusi keuangan sebagai ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

³ <https://money.kompas.com/read/2020/11/03/090400226/beragam-manfaat-kartu-prakerja-tingkatkan-skill-hingga-mendukung-pemulihan>.

⁴ <https://finansial.bisnis.com/read/20200820/90/1281293/waduh-masih-banyak-provinsi-dengan-literasi-dan-inklusi-keuangan-rendah>

B. Kontribusi Subsidi Bunga / Subsidi Margin kepada UMKM di Banten dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Perekonomian Banten setelah mengalami kontraksi yang cukup dalam pada kuartal II-2020 sampai 7,40 persen mulai membaik di kuartal III-2020 walaupun masih berada di zona negatif. Upaya pemerintah menyalurkan jaring bantuan sosial belum cukup memacu pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga yang mendominasi lebih dari separo PDRB Banten. Langkah strategis lain dengan memberi dukungan kepada UMKM, salah satunya melalui restrukturisasi kredit UMKM dengan cara pemberian subsidi bunga atau subsidi margin. Berdasarkan *Online Data System* (ODS) terdapat sekitar 417.058 usaha UMKM di Banten yang dapat menyerap jutaan tenaga kerja. Data secara nasional UMKM mampu mempekerjakan 97 persen tenaga kerja dan cakupan konsumen UMKM mencapai jutaan rumah tangga. Dengan asumsi satu unit usaha UMKM mampu menyerap satu atau dua tenaga kerja, maka tingkat pengangguran di Banten dapat diturunkan. Namun, UMKM di Banten tidak luput dari imbas pandemi Covid-19 sehingga tidak sedikit UMKM di Banten yang gulung tikar akibat lemahnya permintaan atau anjloknya konsumsi masyarakat. Untuk itu UMKM mendapat perhatian khusus dari Pemerintah agar UMKM mampu melewati tekanan ekonomi sebagai dampak Pandemi Covid-19. UMKM di Provinsi Banten memperoleh tambahan subsidi bunga / subsidi margin KUR sebesar Rp39.081.708.228,00 atau 2,31 persen dari alokasi seluruh Indonesia. Nilai tersebut disalurkan kepada 95.644 debitur yang tersebar se-Banten atau 1,71 persen dari seluruh tambahan debitur se-Indonesia. Sedangkan total alokasi subsidi bunga kredit/pembiayaan Non KUR Provinsi Banten memperoleh Rp89.125.628.855,00 atau 2,72 persen dari total nasional dan disalurkan kepada 502.512 debitur (3,53 persen dari total nasional). Secara nyata, kontribusi subsidi bunga bagi UMKM di Banten dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) antara lain :

1. Membantu UMKM meringankan kewajiban bunga pada masa pandemi;
2. UMKM dapat mempertahankan usahanya pada masa pandemi;
3. Mendorong UMKM untuk meningkatkan usahanya;
4. Mendata UMKM yang memiliki pinjaman sebagai bagian basis data UMKM.